



WIDYA PUBLIKA

JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

DAMPAK IMPLEMENTASI PROGRAM DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA DI KELURAHAN TANJUNG BENOA, KECAMATAN KUTA SELATAN, KABUPATEN BADUNG

Rita Yudhiantari Putri¹, Anak Agung Gede Rai²

¹Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Ngurah Rai;
email : ritayudiantariputri@gmail.com

² Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Ngurah Rai;
email : raianakagung2016@gmail.com

Abstract

This study was aimed to examine the impacts, constraints, and solutions to overcome the obstacles in the implementation of the Tangguh Balam Village / Kelurahan program in Tanjung Benoa Village, South Kuta District, Badung Regency. This research was a type of qualitative research with descriptive method. The theory of the determinants of the success of public policy implementation developed by George Edward III was used in analyzing the problems in this study. The sample technique used in this study was purposive sampling. Respondents in this study consisted of six respondents. The results of this study indicate that: The implementation of the Tangguh Bencana Village / Kelurahan program in Tanjung Benoa Village, Badung Regency conducted by BPBD Badung Regency in collaboration with the Tanjung Benoa Urban Village, related agencies and the community are in accordance with Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana BNPB Number 1 of 2012 concerning Village General Guidelines / Tangguh Bencana Village. The impact of the implementation of the program in general has not been able to provide optimal impact. In terms of knowledge, the implementation of the DESTANA program has shown a positive impact, however, in terms of community attitudes and community actions it has not had an impact. There are several obstacles faced in the implementation of the program, namely the lack of competency of human resources officials, lack of knowledge and public awareness of disaster management, lack of facilities for disaster management, inadequate procedures and regulations as guidelines for implementing disaster management, not yet integrated disaster information and communication systems integrated and integrated. While the solution is to overcome these obstacles through efforts to improve the competence of Human Resources, improve facilities and infrastructure to support the program, increase coordination and synergy with relevant agencies and also the community, improving DESTANA program legislation.

Keywords : Publik Policy, Policy Implementation, Resilient Village Disaster, Disaster Management

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak, kendala, dan solusi untuk mengatasi kendala dalam implementasi program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teori faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh George Edward III digunakan dalam menganalisis permasalahan pada penelitian ini. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Responden dalam penelitian ini terdiri dari enam orang responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Implementasi program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Tanjung Benoa Kabupaten Badung yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Badung bekerjasama dengan pihak kelurahan Tanjung Benoa, instansi terkait dan juga masyarakat telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana BNPB No. 1 Tahun 2012 tentang pedoman umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Dampak implementasi program tersebut secara umum belum mampu memberikan dampak yang optimal. Dari sisi pengetahuan implementasi program DESTANA sudah menunjukkan dampak positif namun, dari sisi sikap masyarakat dan tindakan masyarakat belum berdampak. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam Implementasi program yakni kurangnya kompetensi SDM aparat, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap Penanggulangan bencana, kurangnya sarana prasarana penanggulangan bencana, belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana, belum terbagunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi. Sedangkan solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut melalui upaya peningkatan kompetensi SDM, peningkatan sarana dan prasarana penunjang program, peningkatan koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait dan juga masyarakat, penyempurnaan legislasi program DESTANA.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Desa Tangguh Bencana, Penanggulangan Kebencanaan

I. PENDAHULUAN

Bencana adalah suatu atau serangkaian peristiwa yang dapat mengganggu, mengancam dan merusak tatanan kehidupan manusia dan alam sekitarnya. Bencana dapat datang kapan saja dan terjadi dimana saja, bencana dapat disebabkan oleh faktor alam maupun faktor perbuatan manusia. Indonesia berdasarkan letak geografisnya termasuk kedalam daerah kategori rawan bencana. Dalam rangka melakukan upaya penanggulangan bencana, maka pemerintah mengeluarkan landasan hukum yaitu undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) merupakan

Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk dengan tugas dan fungsi kebencanaan mulai dari penanggulangan bencana, hingga rekonstruksi pasca bencana. Mengingat potensi bencana yang tinggi terjadi di seluruh wilayah Indonesia, maka pemerintah pusat meluncurkan program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA). Kabupaten Badung merupakan salah satu Kabupaten di Pulau Bali yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, salah satunya adalah potensi bencana tsunami di wilayah Tanjung Benoa. Pemerintah Kabupaten Badung mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam mendukung komitmen Pemerintah Pusat untuk menciptakan pola penanggulangan bencana di tingkat daerah. Implementasi program DESTANA di Kelurahan Tanjung Benoa sampai saat ini belum berjalan secara optimal akibat adanya kendala internal maupun kendala eksternal.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Kabupaten Badung dan di Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sementara, teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Display Data*), dan Verifikasi Data (*Conclusion*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung

Implementasi program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Tanjung Bena, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dalam pengimplementasiannya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah yang disesuaikan dengan peraturan di atasnya yakni Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Implementasi program DESTANA di Kelurahan Tanjung Bena dilakukan melalui tahapan: Tahap Perencanaan, Pendanaan, Pengembangan Kapasitas, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan pembentukan Forum Penanggulangan Risiko Bencana. Secara umum, implementasi program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Bena Kabupaten Badung belum berjalan dengan optimal karena beberapa kendala yaitu masalah anggaran, kurangnya sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti sarana dan prasarana, rendahnya kompetensi SDM serta yang lebih penting adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk berpartisipasi aktif dalam program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

3.2 Dampak Implementasi program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Tanjung Bena, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung

Dampak Implementasi program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Tanjung Bena Kabupaten Badung yakni secara umum program DESTANA belum mampu memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat di Kelurahan Tanjung Bena. Dampak implementasi program ditinjau berdasarkan dimensi dampak yang dikemukakan Dye dalam (Agustino, 2014:191-193) dan dikaji kembali secara lebih mendalam dengan analisis evaluasi dampak Rochyati (2012) dimana dari empat tipe utama dampak dalam evaluasi dampak yaitu : Dampak pada kehidupan ekonomi, dampak pada proses pembuatan kebijakan, dampak pada sikap publik, dan dampak pada kualitas kehidupan

individu, disimpulkan bahwa implementasi program DESTANA tidak berdampak secara ekonomi namun pada proses kebijakan, sikap public dan kualitas kehidupan implementasi program DESTANA telah menunjukkan dampak yang masih belum optimal atau belum signifikan.

3.3 Kendala Implementasi program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung

Kendala Implementasi program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Tanjung Benoa Kabupaten Badung yakni Kurangnya kompetensi SDM aparat, Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap Penanggulangan bencana, Kurangnya sarana prasarana Penanggulangan bencana, Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana, Belum terbagunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi. Sedangkan solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam Implementasi program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Tanjung Benoa Kabupaten Badung adalah peningkatan kompetensi SDM, peningkatan sarana dan prasarana penunjang program, peningkatan koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait dan juga masyarakat, penyempurnaan legislasi program DESTANA.

IV. PENUTUP

Implementasi program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Tanjung Benoa Kabupaten Badung yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Badung bekerjasama dengan pihak kelurahan tanjung benoa, instansi terkait dan juga masyarakat telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana BNPB No 1 Tahun 2012 tentang pedoman umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Implementasi program DESTANA dilaksanakan melalui tahapan yakni tahap Perencanaan, Pendanaan, Pengembangan Kapasitas, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan pembentukan Forum Penanggulangan Risiko Bencana. Namun, secara umum implementasi program DESTANA masih belum

terlaksana secara optimal yang disebabkan oleh kendala internal maupun eksternal. Implementasi programs ecara umum belum memberikan dampak yang sigifikan bagi masyarakat baik secara langsung maupun tak langsung.

Berdasarkan hasil tersebut maka, BPBD Kabupaten Badung diharapkan dapat mengusulkan upaya peningkatan kuantitas SDM dan melakukan upaya peningkatan kualitas SDM dengan menggelar pelatihan-pelatihan pengembangan SDM dan membekali SDM dengan Standar Kompetensi Kerja Sektor Penanggulangan Bencana melalui sertifikasi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Selain itu, BPBD juga diharapkan mengajukan permohonan peningkatan sarana dan prasarana serta meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar instansi terkait. Pemerintah pusat sebaiknya membuat kebijakan yang komprehensif terkait penanggulangan bencana di Indonesia dan meningkatkan alokasi APBN untuk penanggulangan bencana. Masyarakat diharapkan lebih partisipatif dan pro aktif untuk mendukung program pemerintah khususnya program DESTANA.

Daftar Pustaka

1. Sumber Jurnal / Artikel /Tesis

Ariyani, 2018, Kajian Pelaksanaan Pengembangan Desa Tangguh Bencana Di Gampong Payatieng Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh: (online), (diakses dari: <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/civics/article/download/13139/12691>, tanggal 10 Mei 2019).

Desy, Nirmala Setyawati dan Argo Pambudi, 2018, Efektivitas Program Desa Tangguh Bencana di Desa Argomulyo, Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta: (online). (diakses dari: <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/35311>, tanggal 12 Mei 2019).

Kholimah, Puspitasari, 2018, Implementasi Kebijakan Desa Tangguh Bencana Oleh Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten, *Jurnal Pendidikan Kewaraganearaan*, dan Hukum Volume 7 No 7 Tahun 2018,

Jawa Tengah. (online). (diakses dari: <http://repository.umrah.ac.id/412/>, tanggal 12 Mei 2019).

Maulana, Istu Pradita, 2018, Peran Pemuda Dalam Pengurangan Risiko Bencana dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah Desa Kepurehrejo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Volume 24 No. 2, Agustus 2018 Halaman 261-286, Pusat Pengembangan Kapasitas Dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UGM, Yogyakarta: (online). (diakses dari: <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/adinegara/article/viewFile/13291/12844>, tanggal 13 Mei 2019).

Miftakhul, Munir, 2016, Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kendal. Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta: (online). (diakses dari: <https://digilib.ump.ac.id/files/disk1/39/jhptump-ump-gdl-dahronitji-1948-1-21.pdf>, tanggal 13 Mei 2019).

Munita, Y. Wirawati, 2015, Manajemen Program Desa Tangguh Dalam Menyiapkan Kecakapan Hidup Masyarakat Untuk Menghadapi Bencana di Desa Srimulyo Piyungan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta: (online). (diakses dari: <http://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/4729>, tanggal 14 Mei 2019).

Nina, Marlina, 2017, Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Garut (Studi Kasus: Di Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler), *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Volume 3 Number 1 Juni 2017 pISSN: 2460-6162, eISSN: 2527-6476. (online). (diakses dari: <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JIKA/article/view/5671>, tanggal 12 Mei 2019).

Nur, Bulkis dan Hamka, 2014, Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Desa, *Journal of community participation, infrastructure development*, Vol.1, No. 8, (hal.1-8).

Nurtiana, Noza, 2018, Partisipasi Masyarakat Dalam Program Desa Tangguh Bencana Di Desa Teluk Bakau Kabupaten Bintan, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Sumatera: (online). (diakses dari: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/viewFile/16746/16082>, tanggal 13 Mei 2019).

- Siwu, Angie Febiy Regina, 2017, Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, *Jurnal Administrasi Negara* (online). (diakses dari:<http://docplayer.info/36795796-Implementasi-Kebijakan-Pelayanan-Administrasi-Kependudukan-di-Dinas-Kependudukan-dan-Pencatatan-Sipil-Kota-Bitung>, tanggal 13 Mei 2019).
- Tjipto, Subadi, 2017, Peran Pemerintah Dan Tokoh Masyarakat Desa Dalam Proses Mitigasi Bencana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah: (online). (diakses dari: <https://core.ac.uk/download/pdf/33527193.pdf>, tanggal 13 Mei 2019).
- Yusya, Abubakar, 2015, Kesiapsiagaan Masyarakat Desa Siaga Bencana Dalam Menghadapi Gempa Bumi di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, *Jurnal Ilmu Kebencanaan (JIKA)*, Program Studi Magister Ilmu Kebencanaan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh: (online). (Diakses dari: <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JIKA/article/view/5671>, tanggal 14 Mei 2019).

2. Sumber Buku

- Abdul Wahab, Solichin, 2004, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- AG.Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bridgman, P., and G. Davis, 2014, *Australian Policy Handbook*, Sydney: Allen&Unwin
- Deddy Mulyadi, 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung:Alfabeta
- Dye, Thomas R, 2005, *Understanding Public Policy, Eleventh Edition*, New Jersey: Pearson Prentice Hall
- _____, 1992, *Understanding Public Policy*, New Jersey: Englewood Cliffs.
- Edwards III, G.C, 1980, *Implementing Public Policy*, Washington D.C.: Congressional Quarterly Press

- Fauzan, Ahmad, 2017, *Puluhan Pemuda ASEAN Siap Bangun Komunitas Tanggap Bencana di Lembang*, (online).(diaksesdari <http://kabarkampus.com/2017/02/14/puluhan-pemuda-asean-siap-bangun-komunitas-tanggap-bencana-di-lembang/> tanggal 5 April 2019).
- Grindle, Merilee S, 1980, *Politics and Policy Implementation in The Third World*, New Jersey: Princnton University Press.
- Islamy, M.Irfan, 2009, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- James E. Anderson, 1996, *Public Policy Making 2nd ed*, New York: Holt, Rinehart and Winston
- Joko Widodo, 2008, *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta: Bayumedia
- Keban, Yeremias T, 2004, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, Dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media
- Kodoatie, Robert & Roestam Sjarief, 2006, *Pengelolaan Bencana Terpadu Banjir, Longsor,kekeringan dan Tsunami*, Jakarta: Yarsif Watampone
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J., 2014, *Qualitative Data Analisis, A Methods Sourcebook*, Edition 3, USA: Sage Publications, Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI Press.
- Moleong, Lexy J., 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- _____, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung: Penerbit Rosdakarya.
- _____,2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, 2013, *Mengenal XAMPP Awal*, Yogyakarta: Mediakom.
- Pasolong, Harbani, 2012, *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Priambodo, Ari, 2013, *Panduan Praktis Menghadapi Bencana badai-banjir-gempabumi-letusan gunung berapi, kerusuhan massal-terror bom,kebakaran-polusi lingkungan*. Yogyakarta: Knisius.

Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifudin, 2011, *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.

Sekaran, Uma, 1992, *Research Methods for Business Third Edition*, USA: Southern Illionis University.

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

_____, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

T. Keban, Yeremias, 2014, *Enam Dimensi Stategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu. Edisi Ketiga*, Yogyakarta: Gava Media.

Tomuka J, Siwu J, Mallo J F., 2016, *Hubungan Panjang Telapak Kaki Dengan Tinggi Badan Untuk Identifikasi Forensik*, USA: J e-Clinic.

Winarto. Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

_____, 2007, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*, Yogyakarta: Media Presindo

3. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66 tambahan lembaran negara republik Indonesia 2723 Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internationa dan lembaga Asing non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Nomor 3 tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan penanggulangan Bencana Daerah.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Nomor 1 tahun 2012 Penanggulangan Bencana Daerah.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Nomor 2 tahun 2017 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Penanggulangan Bencana Daerah.

Peraturan Darah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.